



BPK RI
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel **K**ompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**bangga
melayani
bangsa**

Tata Kelola Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Biro Sumber Daya Manusia



Tangerang Selatan, 27 Mei 2025



1

Latar Belakang, Tujuan, dan Dasar Hukum

2

Profil Jabatan ASN PPPK di BPK

3

Perbandingan PNS dan PPPK

4

Ringkasan Perjalanan Seleksi PPPK

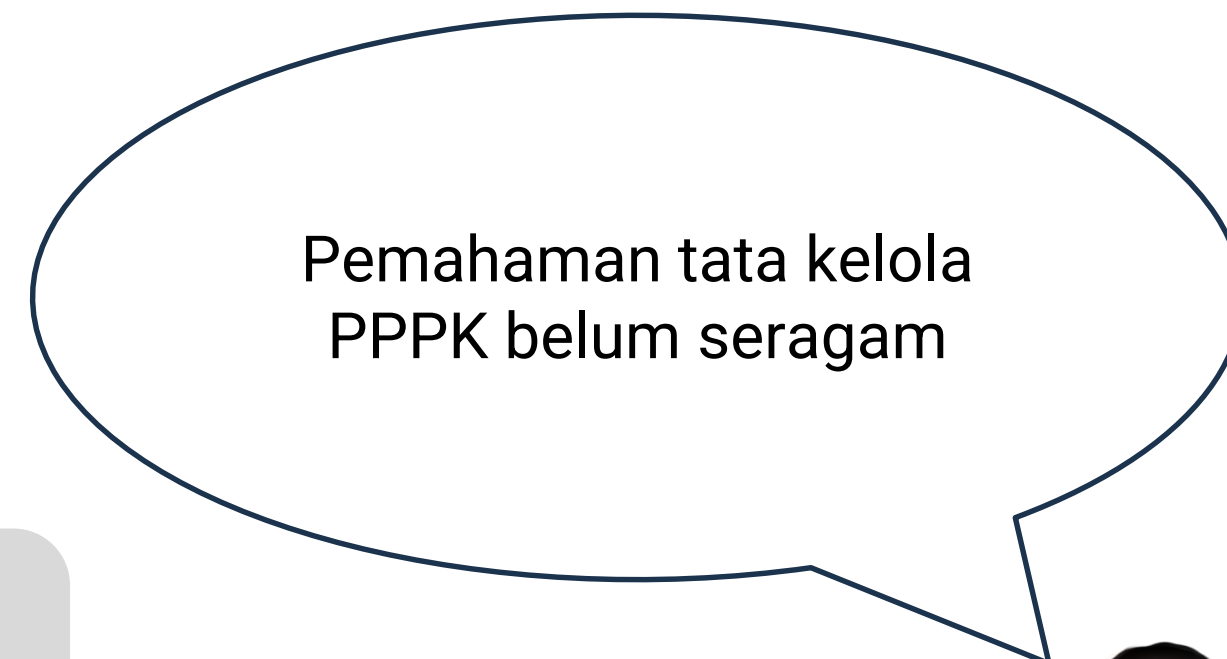
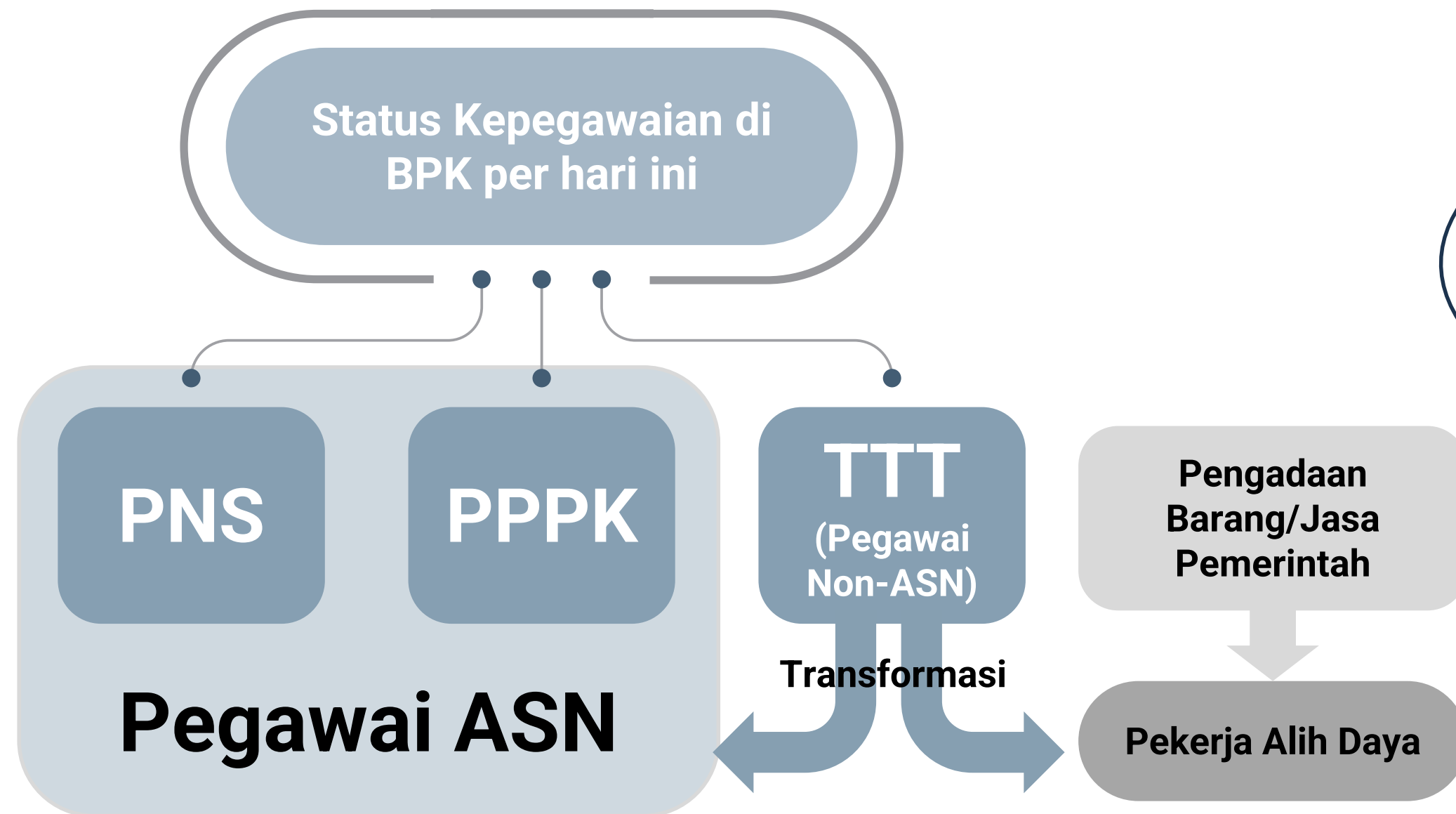
5

Tata Kelola PPPK



BPK RI
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

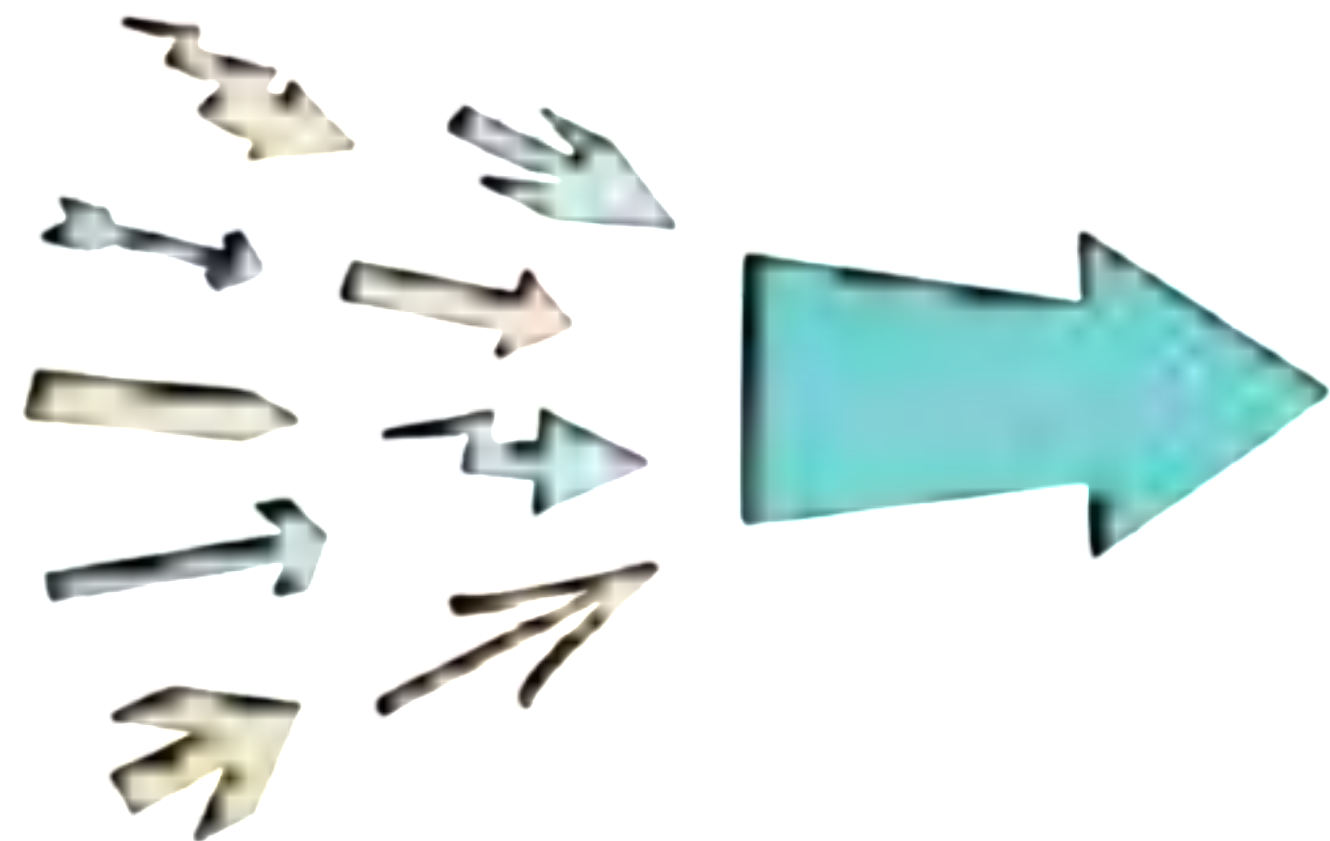
Latar Belakang





BPK RI
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Tujuan



1

Menyeragamkan pemahaman atas pengelolaan PPPK di lingkungan Pelaksana BPK.

2

Memperoleh masukan atas pengelolaan PPPK yang ada di Unit Kerja untuk pengembangan kebijakan pengelolaan PPPK di lingkungan Pelaksana BPK.



Dasar Hukum yang Relevan

1

UU 20/2023: Aparatur Sipil Negara

2

PP 49/2018: Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

3

Per Menpan RB 6/2024: Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara

4

Per Menpan RB 70/2020: Masa Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

5

Per Kepala BKN 7/2022: Tata Cara Pemberian Cuti PPPK

Jumlah ASN PPPK di BPK

Formasi TA 2022

JF Nakes | TMT 1 April 2023

Dokter Ahli Pertama	1
Dokter Gigi Ahli Pertama	1
Jumlah	2

JF Teknis | TMT 1 Juli 2023

Arsiparis Ahli Pertama	14
Pengelola PBJ Ahli Pertama	1
Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama	1
Pranata Humas Ahli Pertama	20
Arsiparis Terampil	5
Jumlah	41

Formasi TA 2022 (Optimalisasi)

JF Teknis | TMT 1 Nov. 2023

Arsiparis Ahli Pertama	39
Pranata Komputer Ahli Pertama	10
Arsiparis Terampil	4
Jumlah	53

Formasi TA 2023

JF Nakes | TMT 1 Maret 2024

Dokter Gigi Ahli Pertama	1
--------------------------	---

JF Teknis | TMT 1 Maret 2024

Arsiparis Ahli Pertama	15
Pranata Humas Ahli Pertama	4
Pranata Komputer Ahli Pertama	23
Arsiparis Terampil	1
Jumlah	43

Formasi TA 2024

JF Nakes | TMT 1 Maret 2025

Apoteker Ahli Pertama	1
Perawat Terampil	24
Terapis Gigi dan Mulut Terampil	4
Jumlah	29

JP Teknis | TMT 1 Apr. 2025

Pengadministrasi Perkantoran	250
Pengelola Umum Operasional	4
Jumlah	254

Tahap I

Lulus seleksi dan diangkat menjadi CPNS BPK TA 2024



423 Orang

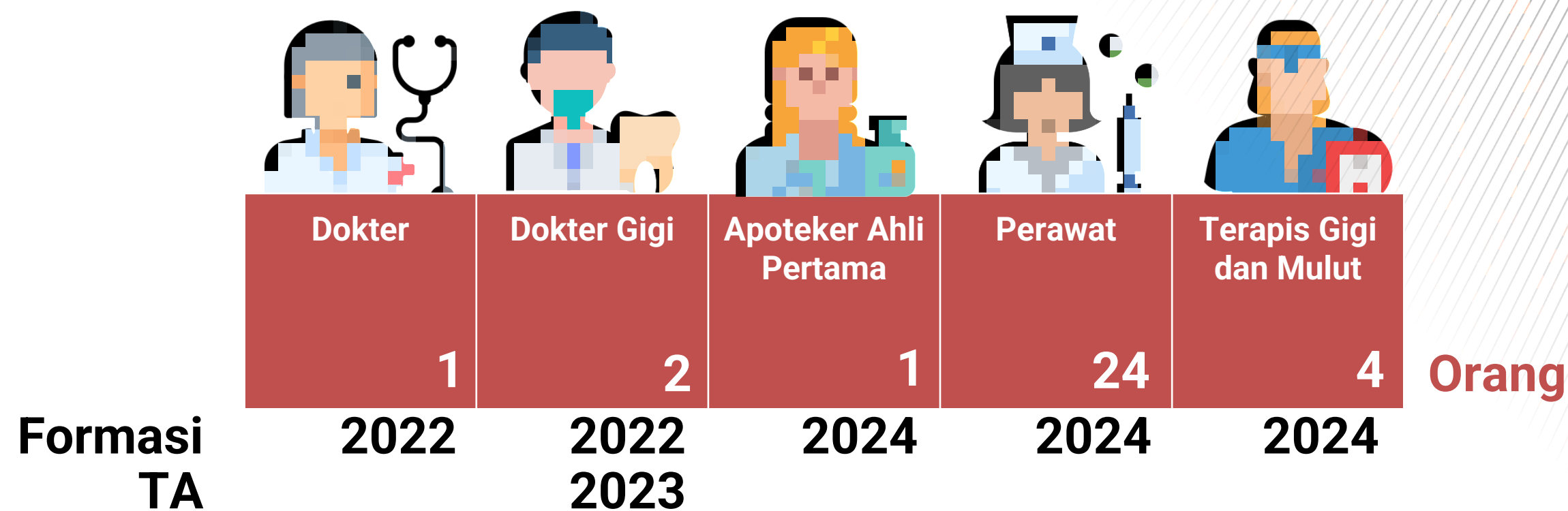
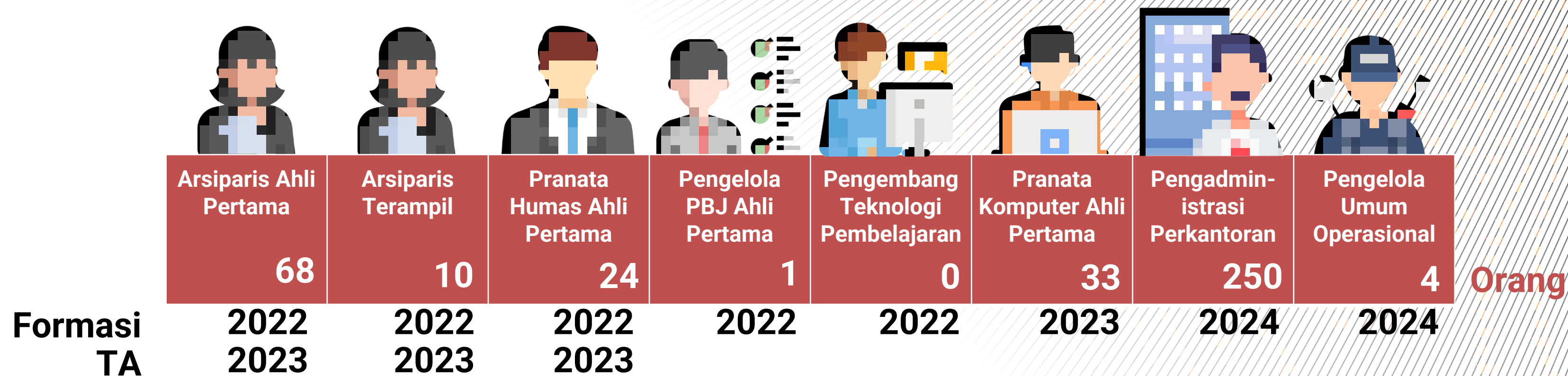
Profil Jabatan ASN PPPK di BPK

JABATAN	PENDIDIKAN	PRIA	WANITA	GRAND TOTAL
Jabatan Fungsional				
Apoteker Ahli Pertama	S-1 Profesi Apoteker	0	1	1
Arsiparis Ahli Pertama	D-IV Kearsipan / S-1 Akuntansi / S-1 Manajemen / S-1 Sistem Informasi / S-1 Administrasi Negara / S-1 Hukum	43	25	68
Dokter Gigi Ahli Pertama	S-1 Profesi Dokter Gigi	0	2	2
Dokter Ahli Pertama	S-1 Profesi Dokter	0	1	1
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	S-1 Akuntansi / S-1 Manajemen / S-1 Hukum	0	1	1
Perawat Terampil	D-III Keperawatan	3	24	27
Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	S-1 Ilmu Komunikasi / S-1 Manajemen / S-1 Ilmu Pemerintahan / S-1 Sistem Informasi / S-1 Administrasi Negara / S-1 Sastra Inggris	12	12	24
Pranata Komputer Ahli Pertama	S-1 Teknik Informatika / S-1 Sistem Informasi / S-1 Sistem Komputer / S-1 Teknik Komputer / S-1 Ilmu Komputer	30	3	33
Arsiparis Terampil	D-III Kearsipan / D-III Manajemen Informasi dan Dokumen / D-III Sekretari / D-III Akuntansi / D-III Manajemen Informatika	6	4	10
Terapis Gigi dan Mulut Terampil	D-III Keperawatan / D-III Kesehatan Gigi	0	1	1
Jabatan Pelaksana				
Pengadministrasi Perkantoran	SLTA/Sederajat	163	87	250
Pengelola Umum Operasional	SD/Sederajat	4		4
GRAND TOTAL		261	161	422



BPK RI
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Profil Jabatan ASN PPPK di BPK





Profil Jabatan ASN PPPK di BPK

Unit Kerja	Apoteker Ahli Pertama	Arsiparis Ahli Pertama	Arsiparis Terampil	Dokter Gigi Pertama	Dokter Pertama	Pengadminis-trasi Perkantoran	Pengelola PBJ Ahli Pertama	Pengelola Umum Operasional	Perawat Terampil	Pranata Humas Ahli Pertama	Pranata Komputer Ahli Pertama	Terapis Gigi dan Mulut Terampil	Grand Total
Badan Binbangkum PKN	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
Badiklat PKN	0	4	1	0	0	22	0	3	0	0	2	0	32
BDPKN Gowa	0	0	0	0	0	18	0	0	2	0	0	0	20
BDPKN Medan	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	7
BDPKN Yogyakarta	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4
Biro Humas dan KSI	0	0	0	0	0	6	0	0	0	2	0	0	8
Biro Keuangan	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4
Biro Sekretariat Pimpinan	0	0	0	0	0	23	0	0	0	13	0	0	36
Biro Sumber Daya Manusia	1	0	0	2	1	8	0	0	3	0	2	2	19
Biro Teknologi Informasi	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	29	0	31
Biro Umum	0	9	2	0	0	56	0	1	0	0	0	0	68
Ditjen Pemeriksaan Investigasi	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Ditjen PKN I	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Ditjen PKN II	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Ditjen PKN III	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Ditjen PKN IV	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Ditjen PKN V	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Ditjen PKN VI	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Ditjen PKN VII	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4



Profil Jabatan ASN PPPK di BPK

Unit Kerja	Apoteker Ahli Pertama	Arsiparis Ahli Pertama	Arsiparis Terampil	Dokter Gigi Pertama	Dokter Pertama	Pengadminis-trasi Perkantoran	Pengelola PBJ Ahli Pertama	Pengelola Umum Operasional	Perawat Terampil	Pranata Humas Ahli Pertama	Pranata Komputer Ahli Pertama	Terapis Gigi dan Mulut Terampil	Grand Total
BPK Perwakilan Aceh	0	1	0	0	0	4	0	0	1	0	0	0	6
BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	1	0	0	0	5	0	0	1	1	0	0	8
BPK Perwakilan Provinsi Bali	0	1	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	4
BPK Perwakilan Provinsi Banten	0	1	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	5
BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu	0	1	0	0	0	4	0	0	1	0	0	0	6
BPK Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Jakarta	0	1	0	0	0	9	0	0	1	1	0	0	12
BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3
BPK Perwakilan Provinsi Jambi	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat	0	1	0	0	0	5	0	0	1	0	0	0	8
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	3
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur	0	1	0	0	0	2	0	0	1	1	0	1	6
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat	0	1	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	4
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah	0	1	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	4
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3
BPK Perwakilan Provinsi Kep. Bangka Belitung	0	1	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	5
BPK Perwakilan Provinsi Kep. Riau	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
BPK Perwakilan Provinsi Lampung	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	3
BPK Perwakilan Provinsi Maluku	0	1	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	5
BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara	0	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	5
BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat	0	1	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	5
BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur	0	1	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	5
BPK Perwakilan Provinsi Papua	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
BPK Perwakilan Provinsi Riau	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	4
BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat	0	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	5
BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan	0	1	0	0	0	2	0	0	1	1	0	1	6
BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3
BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	4
BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	3
BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	4
BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan	0	1	0	0	0	3	0	0	1	1	0	0	6
BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara	0	1	0	0	0	6	0	0	0	1	0	0	8



PNS

1 Definisi

WNI yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

2 Hak

Penghasilan; penghargaan yang bersifat motivasi; tunjangan dan fasilitas; jaminan sosial; lingkungan kerja; pengembangan diri; dan bantuan hukum.

3 Kewajiban

1. Setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah.
2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Melaksanakan kebijakan pemerintah.
4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Melaksanakan tugas kedinasan.
6. Menunjukkan integritas dan keteladanan baik di dalam maupun di luar kedinasan.
7. Menyimpan rahasia jabatan.
8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI.

PPPK

WNI yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat berdasarkan perjanjian kerja **untuk jangka waktu tertentu** untuk menjalankan tugas pemerintahan

Memiliki hak yang sama dengan PNS, **kecuali hak atas Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua** (sumber: PP Manajemen PNS dan PP Manajemen PPPK)

PNS

4 Syarat Usia Pendaftaran

Min. 18 dan Maks. 35.

5 Tahapan Pengadaan

1. Perencanaan;
2. Pengumuman Lowongan;
3. Pelamaran;
4. Seleksi;
5. Pengumuman Hasil Seleksi;
6. Pengangkatan Calon PNS dan **Masa Percobaan** Calon PNS; dan
7. Pengangkatan Menjadi PNS

6 Tahapan Seleksi

1. Seleksi Administrasi
2. Seleksi Kompetensi Dasar
3. Seleksi Kompetensi Bidang

PPPK

Min. 20 dan Maks. 1 tahun sebelum BUP jabatan.

1. Perencanaan;
2. Pengumuman Lowongan;
3. Pelamaran;
4. Seleksi;
5. Pengumuman Hasil Seleksi;
6. Pengangkatan Menjadi PPPK.

1. Seleksi Administrasi
2. Seleksi Kompetensi

PNS

7 Jabatan ASN yang Dapat Diisi

Seluruh jabatan ASN.

1. JPT Madya tertentu dan JPT Utama tertentu
2. JF tertentu
3. **Jabatan Pelaksana**
4. Jabatan lain yang ditetapkan oleh Menpan RB.

8 Perpindahan dan Pengembangan Karier

Terdapat mekanisme perpindahan dan pengembangan karier pegawai.

1. **Tidak terdapat mekanisme perpindahan dan pengembangan karier pegawai.**
2. Pengisian jabatan hanya untuk satu jabatan dengan jenjang, lokasi penempatan, dan masa perjanjian kerja tertentu.



Ringkasan Perjalanan Seleksi PPPK

Formasi TA 2022

Formasi TA 2022 (Optimalisasi)

Formasi TA 2023

Formasi TA 2024 Tahap I

Formasi TA 2024 Tahap II

Kriteria Pelamar

PPPK Tenaga Kesehatan:

- Eks Tenaga Honorer Kategori II
- Tenaga Non ASN yang terdaftar pada database BKN
- Pelamar dapat mendaftar lintas instansi

PPPK Tenaga Teknis:

Seleksi terbuka sesuai persyaratan dalam ketentuan yang dituangkan dalam Pengumuman Lowongan

Peserta seleksi PPPK Tenaga Teknis formasi TA 2022 yang tidak memenuhi Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi pada formasi yang tidak terpenuhi yang terdiri atas:

- Eks Tenaga Honorer Kategori II yang terdaftar dalam pangkalan data BKN; dan
- Tenaga Non ASN yang bekerja di BPK dan sudah di verval oleh BPK.

Kebutuhan Umum:

Seleksi terbuka sesuai persyaratan dalam ketentuan yang dituangkan dalam Pengumuman Lowongan

Kebutuhan Khusus:

- Eks Tenaga Honorer Kategori II yang terdaftar dalam pangkalan data BKN;
- Tenaga Non ASN yang terdaftar dalam pangkalan data BKN; dan
- Pelamar yang mendaftar pada instansi tempat bekerja.

Tenaga Non ASN BPK yang terdaftar dalam pangkalan data BKN dan masih aktif bekerja di BPK.

Tenaga Non ASN BPK yang tidak terdaftar dalam pangkalan data BKN tetapi aktif bekerja di BPK min. 2 tahun secara terus menerus.

Mekanisme Seleksi

Memenuhi syarat Nilai Ambang Batas dan berperingkat terbaik.

Berperingkat terbaik (tidak ada ketentuan Nilai Ambang Batas).

Kebutuhan Umum:

Memenuhi syarat Nilai Ambang Batas dan berperingkat terbaik.

Kebutuhan Khusus:

Berperingkat terbaik (tidak ada ketentuan Nilai Ambang Batas).

Berperingkat terbaik sesuai formasi yang tersedia (tidak ada ketentuan Nilai Ambang Batas).

Berperingkat terbaik sesuai sisa formasi Tahap I (tidak ada ketentuan Nilai Ambang Batas).

Untuk Mengisi Kebutuhan

- Dokter Ahli Pertama
- Dokter Gigi Ahli Pertama
- Arsiparis Ahli Pertama
- Pengelola PBJ Ahli Pertama
- Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama
- Pranata Humas Ahli Pertama
- Arsiparis Terampil

- Arsiparis Ahli Pertama
- Pranata Komputer Ahli Pertama
- Arsiparis Terampil

- Dokter Gigi Ahli Pertama
- Arsiparis Ahli Pertama
- Pranata Humas Ahli Pertama
- Pranata Komputer Ahli Pertama
- Arsiparis Terampil

- Apoteker Ahli Pertama
- Perawat Terampil
- Terapis Gigi dan Mulut Terampil
- Pengadministrasi Perkantoran
- Pengelola Umum Operasional

- Perawat Terampil
- Pengadministrasi Perkantoran
- Pengelola Umum Operasional



PPPK

1

- Penetapan Kebutuhan
- Pengadaan

2

- Penilaian Kinerja
- Disiplin
- Pemberian Penghargaan

3

- Penggajian dan Tunjangan
- Perlindungan

4

Pengembangan Kompetensi

5

- Perpanjangan Perjanjian Kerja
- Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja

Proses Manajemen PPPK Vs. PNS

PNS

1

- Penetapan Kebutuhan
- Pengadaan
- Pola Karier

2

- Penilaian Kinerja
- Disiplin
- Pemberian Penghargaan

3

- Penggajian dan Tunjangan
- Perlindungan
- Jaminan Pensiun dan JHT

4

Pengembangan Karier

5

- Pangkat dan Jabatan
- Mutasi dan Promosi
- Pemberhentian